Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Determinan Akuntabilitas Publik: Sistem Politik, Demokrasi, Pertumbuhan Ekonomi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Korupsi, dan Sistem Akuntansi

Aep Saepudin[1], Tarinih[2], Arif Helmy[3]
[123,] STIE Miftahul Huda Subang, Indonesia
asaepudin966@gmail.com,tarinih80@yahoo.co.id, arifhelmy1@gmail.com

ABSTRACT

Public accountability is a fundamental component of effective governance, as it requires governments to justify the exercise of public authority, the allocation of public resources, and the consequences of their decisions. However, existing studies tend to examine the determinants of public accountability in isolation, resulting in a fragmented understanding of how institutional, economic, human, informational, and governance factors interact to shape accountability outcomes. This study addresses this gap by systematically synthesizing empirical evidence on six major determinants of public accountability: political systems, democratic quality, economic growth, human resource quality, corruption, and accounting systems. A systematic literature review *was conducted using selection and reporting procedures adapted from PRISMA 2020, supported by* thematic coding*, a synthesis matrix of 30 empirical studies, and a structured* quality assessment*. The findings reveal four interconnected pathways underlying public accountability:* institutional pressure*, arising from political and democratic arrangements;* economic capacity*, reflecting the resources available to support accountable governance;* human capability*, representing the competence and quality of public-sector human resources; and* information infrastructure*, encompassing accounting systems, financial reporting, auditing, and transparency mechanisms. Corruption is identified as an* accountability friction *that can weaken the effectiveness of these mechanisms by distorting institutional incentives, reducing transparency, and undermining public oversight. Building on these findings, this study proposes the Integrated Public Accountability Determinant Framework (IPADF), a multidimensional framework that conceptualizes public accountability as the outcome of interactions among institutional pressure, economic capacity, human capability, information infrastructure, public oversight, and corruption-related friction. The synthesis further highlights a critical distinction between* formal accountability*—reflected in reporting compliance and audit outcomes—and* substantive accountability*, which concerns whether government actions are genuinely transparent, answerable, and responsive to public interests. Seven empirically testable hypotheses are subsequently formulated, including the proposition that democratic quality moderates the relationship between accounting systems and public accountability. The IPADF contributes to the accountability literature by integrating previously fragmented determinants into a coherent analytical framework and provides a basis for future cross-country panel studies and empirical research on local governments in Indonesia.*

Keywords: *public accountability; political system; democratic quality; economic growth; human resource quality; corruption; accounting system; systematic literature review; IPADF.*

ABSTRAK

Akuntabilitas publik merupakan komponen mendasar dari tata kelola yang efektif, karena menuntut pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang publik, alokasi sumber daya publik, dan konsekuensi dari keputusan mereka. Namun, studi-

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

studi yang ada cenderung mengkaji faktor-faktor penentu akuntabilitas publik secara terpisah, sehingga menghasilkan pemahaman yang terfragmentasi mengenai bagaimana faktor kelembagaan, ekonomi, sumber daya manusia, informasi, dan tata kelola saling berinteraksi dalam membentuk hasil akuntabilitas. Studi ini menjawab kesenjangan tersebut dengan menyintesiskan bukti empiris secara sistematis mengenai enam faktor penentu utama akuntabilitas publik: sistem politik, kualitas demokrasi, pertumbuhan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, korupsi, dan sistem akuntansi. Tinjauan pustaka sistematis dilakukan menggunakan prosedur seleksi dan pelaporan yang diadaptasi dari PRISMA 2020, serta didukung oleh pengodean tematik, matriks sintesis dari 30 studi empiris, dan penilaian kualitas yang terstruktur. Temuan studi mengungkapkan empat jalur saling terkait yang mendasari akuntabilitas publik: tekanan kelembagaan, yang muncul dari pengaturan politik dan demokrasi; kapasitas ekonomi, yang mencerminkan sumber daya yang tersedia untuk mendukung tata kelola yang akuntabel; kapabilitas manusia, yang mewakili kompetensi dan kualitas sumber daya manusia sektor publik; serta infrastruktur informasi, yang mencakup sistem akuntansi, pelaporan keuangan, audit, dan mekanisme transparansi. Korupsi diidentifikasi sebagai faktor penghambat (*friction*) akuntabilitas yang dapat melemahkan efektivitas mekanisme-mekanisme tersebut dengan mendistorsi insentif kelembagaan, mengurangi transparansi, dan melemahkan pengawasan publik. Berdasarkan temuan tersebut, studi ini mengusulkan *Integrated Public Accountability Determinant Framework* (IPADF), sebuah kerangka kerja multidimensi yang mengonseptualisasikan akuntabilitas publik sebagai hasil interaksi antara tekanan kelembagaan, kapasitas ekonomi, kapabilitas manusia, infrastruktur informasi, pengawasan publik, dan hambatan terkait korupsi. Sintesis ini juga menyoroti perbedaan penting antara akuntabilitas formal—yang tercermin dalam kepatuhan pelaporan dan hasil audit—dan akuntabilitas substantif, yang berkaitan dengan apakah tindakan pemerintah benar-benar transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan responsif terhadap kepentingan publik. Selanjutnya, dirumuskan tujuh hipotesis yang dapat diuji secara empiris, termasuk proposisi bahwa kualitas demokrasi memoderasi hubungan antara sistem akuntansi dan akuntabilitas publik. IPADF berkontribusi pada literatur akuntabilitas dengan mengintegrasikan faktor-faktor penentu yang sebelumnya terfragmentasi ke dalam kerangka analisis yang koheren, serta menyediakan landasan bagi studi panel lintas negara dan penelitian empiris mengenai pemerintah daerah di Indonesia di masa mendatang.
Kata kunci: akuntabilitas publik; sistem politik; kualitas demokrasi; pertumbuhan ekonomi; kualitas sumber daya manusia; korupsi; sistem akuntansi;

PENDAHULUAN

Akuntabilitas publik menempati posisi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan dengan kewajiban pejabat dan institusi publik untuk mempertanggungjawabkan penggunaan kewenangan serta sumber daya yang berada di bawah penguasaannya. Dalam kerangka Bovens (2007), akuntabilitas dibangun melalui relasi antara *actor* dan *forum*. Relasi tersebut mengharuskan aktor memberikan penjelasan sekaligus pembenaran atas tindakan yang dilakukan, sementara forum memiliki kewenangan untuk mengajukan pertanyaan, melakukan penilaian, dan, dalam kondisi tertentu, menjatuhkan konsekuensi.

Dalam sistem demokrasi, proses pertanggungjawaban pemerintah tidak berlangsung melalui satu saluran saja. Mekanisme tersebut tersebar pada berbagai institusi dan ruang publik, antara lain pemilihan umum, lembaga legislatif, media,

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

organisasi masyarakat sipil, lembaga audit, peradilan, serta perangkat administratif. Christensen dan Yamamoto (2023) menjelaskan bahwa demokrasi dan akuntabilitas publik mempunyai hubungan yang erat karena keduanya berkembang dalam suatu arena yang mempertemukan banyak aktor dengan beragam mekanisme pertanggungjawaban. Sejalan dengan pandangan tersebut, Parker dan Favotto (2026) menegaskan bahwa praktik akuntansi dan audit sektor publik tidak dapat dipisahkan dari konteks politik. Informasi akuntansi dapat berfungsi sebagai alat untuk membangun reputasi pemerintah, mendukung agenda politik, dan memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan organisasi publik.

Atas dasar tersebut, konfigurasi sistem politik dapat dipandang sebagai salah satu faktor fundamental yang membentuk akuntabilitas. Institusi politik yang mampu membatasi konsentrasi kekuasaan, menjalankan mekanisme *checks and balances*, serta menciptakan kemungkinan pergantian kekuasaan yang kredibel akan meningkatkan dorongan pemerintah untuk memperhatikan tuntutan masyarakat. Aidt et al. (2008) memperlihatkan bahwa keterkaitan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kualitas institusi politik. Sementara itu, Benhabib dan Przeworski (2010) menempatkan *political accountability* sebagai mekanisme penting yang dapat membatasi perilaku pemerintah, termasuk dalam keputusan yang berkaitan dengan ekstraksi rente.

Efektivitas tekanan politik tersebut selanjutnya bergantung pada kualitas demokrasi. Demokrasi yang lebih berkualitas dapat memperluas ruang partisipasi, memperkuat kontrol terhadap pemerintah, dan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menilai kinerja pejabat publik. Dari perspektif pembangunan, Acemoglu et al. (2019) menunjukkan bahwa proses demokratisasi berkaitan dengan peningkatan investasi terhadap modal manusia dan kapasitas ekonomi dalam jangka panjang. Bukti agregat yang dihimpun oleh Colagrossi et al. (2020) juga menunjukkan kecenderungan hubungan positif antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, meskipun besarnya pengaruh berbeda menurut wilayah dan periode pengamatan. Pada level pemerintah daerah di Indonesia, Rakhman dan Saudagaran (2023) menemukan bahwa dinamika politik selama siklus anggaran dapat tercermin dalam laporan keuangan pemerintah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan informasi keuangan berpotensi menjadi sarana bagi pemilih untuk mengevaluasi kinerja pejabat yang sedang berkuasa.

Selain faktor politik, kondisi ekonomi dapat dipahami sebagai sumber kapasitas dalam membangun akuntabilitas. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh basis fiskal yang lebih kuat memberikan pemerintah kemampuan yang lebih besar untuk mengembangkan infrastruktur informasi, memperkuat fungsi audit, meningkatkan kompetensi aparatur, melakukan digitalisasi, dan menyediakan ruang bagi partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, ketersediaan sumber daya ekonomi tidak dengan sendirinya menjamin munculnya tata kelola yang akuntabel. Acemoglu et al. (2005) menekankan bahwa hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh institusi politik dan ekonomi yang membentuk insentif para pelaku. Oleh karena itu, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap akuntabilitas sebaiknya dipahami sebagai

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

hubungan yang dipengaruhi oleh kualitas institusional, bukan sebagai hubungan otomatis.

Faktor berikutnya adalah kualitas sumber daya manusia yang berfungsi sebagai mekanisme kapabilitas. Praktik akuntansi dan sistem akuntabilitas membutuhkan aparatur yang memiliki pemahaman memadai mengenai standar akuntansi, teknologi informasi, pengendalian internal, audit, serta kemampuan menggunakan pertimbangan profesional. Dalam konteks Indonesia, McLeod dan Harun (2014) menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi akuntansi sektor publik menghadapi kendala yang berkaitan dengan kapasitas tenaga akuntansi. Rakhman dan Wijayana (2024) kemudian memberikan bukti bahwa tingkat pembangunan manusia berhubungan dengan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun, peningkatan kemampuan tersebut juga dapat memberikan ruang yang lebih besar bagi penggunaan *accrual judgment* secara oportunistik.

Di sisi lain, korupsi dapat menghambat proses pertanggungjawaban dengan mengganggu keterkaitan antara penyediaan informasi, pengawasan, dan pemberian konsekuensi. Dalam perspektif ini, korupsi tidak hanya ditempatkan sebagai variabel negatif yang berdiri sendiri, tetapi sebagai suatu bentuk *accountability friction* yang berpotensi mengurangi efektivitas mekanisme akuntabilitas. Mauro (1995) menunjukkan bahwa korupsi berkaitan negatif dengan investasi dan pertumbuhan. Sementara itu, Chen dan Neshkova (2020) menemukan adanya hubungan antara transparansi fiskal dan tingkat persepsi korupsi yang lebih rendah dalam panel 95 negara. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa informasi fiskal mempunyai fungsi yang lebih luas daripada sekadar memenuhi kebutuhan pelaporan karena informasi juga dapat digunakan untuk mengawasi perilaku dan membatasi peluang penyalahgunaan sumber daya publik.

Dalam kerangka tersebut, sistem akuntansi dapat diposisikan sebagai *information infrastructure* bagi akuntabilitas. Sistem ini menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemerintah, lembaga pengawasan, legislatif, dan masyarakat untuk menilai bagaimana sumber daya publik direncanakan, digunakan, serta dipertanggungjawabkan. Chan (2003) menekankan bahwa desain akuntansi pemerintah perlu mempertimbangkan tujuan pelaporan, kebutuhan pengguna informasi, serta karakteristik dan standar yang sesuai dengan lingkungan sektor publik. Di Indonesia, penerapan akuntansi berbasis akrual sebagai contoh, diarahkan untuk memperkuat tata kelola serta menghasilkan informasi keuangan yang lebih komprehensif. Namun, keberhasilan reformasi tersebut tidak hanya bergantung pada perubahan regulasi, melainkan juga pada kemampuan aparatur dan dukungan institusional yang memadai (McLeod & Harun, 2014). Demikian hasil penelitian yang sama di Vietnam juga memperlihatkan bahwa kualitas pelaporan keuangan dan kapasitas akuntansi mempunyai hubungan positif dengan akuntabilitas publik (Tran et al., 2021).

Meskipun berbagai studi telah menghasilkan bukti mengenai faktor-faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas, literatur yang tersedia masih cenderung berjalan dalam jalur yang terpisah. Kondisi tersebut memberikan ruang untuk mengembangkan *Integrated Public Accountability Determinant Framework* (IPADF).

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Kerangka ini diarahkan untuk menjelaskan akuntabilitas publik bukan sebagai akibat dari satu determinan tunggal, melainkan sebagai hasil dari keterkaitan antara tekanan institusional, kapasitas ekonomi, kapabilitas sumber daya manusia, infrastruktur informasi, mekanisme pengawasan publik, dan hambatan yang ditimbulkan oleh korupsi. Dengan pendekatan integratif tersebut, IPADF diharapkan mampu menjembatani temuan-temuan literatur yang selama ini terpisah sekaligus menyediakan dasar teoritis

Akuntabilitas publik menurut Romzek dan Ingraham (2000) dapat dipahami sebagai jaringan hubungan pertanggungjawaban yang membuat tindakan dan kinerja pejabat publik dapat dinilai berdasarkan berbagai standar dan tuntutan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau kewenangan pengawasan. Mereka menekankan bahwa seorang pejabat publik sering menghadapi tekanan akuntabilitas yang saling beririsan (*cross pressures*), misalnya tuntutan untuk berinisiatif dan inovatif sekaligus tuntutan untuk mematuhi aturan dan rantai komando. Demikian itu menurut Mulgan (2000) disebutkan kewajiban pertanggungjawaban kepada pihak lain, terutama mengenai tindakan dan keputusan yang telah dilakukan. Atau dalam terminologi Bovens (2007), relasi akuntabilitas memerlukan actor, forum, kewajiban menjelaskan, kesempatan forum mengajukan pertanyaan, penilaian, dan konsekuensi. Dengan demikian, transparansi adalah kondisi pendukung, sedangkan akuntabilitas memerlukan proses evaluasi dan respons.

Sedangkan O'Donnell (1998) membedakan akuntabilitas dalam sistem demokrasi menjadi *vertical accountability* dan *horizontal accountability*. Akuntabilitas vertikal terjadi melalui mekanisme seperti pemilu, sedangkan akuntabilitas horizontal berlangsung melalui lembaga-lembaga negara yang saling mengawasi. Dalam sektor publik, akuntabilitas dapat dibedakan menjadi vertical accountability, horizontal accountability, legal accountability, professional accountability, dan social accountability. Dan model IPADF memusatkan perhatian pada bagaimana berbagai bentuk tekanan tersebut bertemu dengan sistem informasi dan kapasitas internal pemerintah.

METODE PENELITIAN

Desain Systematic Literature Review

Penelitian menggunakan *systematic literature review* (SLR) dengan sintesis naratif dan thematic coding. Proses review dirancang mengikuti prinsip PRISMA 2020 dalam hal identifikasi, screening, eligibility, dan inclusion. Karena pencarian dilakukan melalui sumber web akademik dan metadata penerbit, bukan satu ekspor database Scopus/WoS yang lengkap, angka aliran PRISMA dalam naskah ini harus dipahami sebagai corpus review terkurasi untuk artikel konseptual, bukan klaim bahwa seluruh artikel dunia telah teridentifikasi.

Sintesis Demokrasi

Demokrasi berperan sebagai pressure mechanism melalui pemilu, kebebasan informasi, partisipasi, media, dan legislatif. Namun, demokrasi formal tidak selalu berarti demokrasi substantif. Christensen dan Yamamoto (2023) menekankan

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

pluralitas arena akuntabilitas, sementara Kim dan Lee (2019) menunjukkan bahwa partisipasi warga terkait dengan persepsi transparansi. Dengan demikian, kualitas demokrasi sebaiknya diukur multidimensional, misalnya melalui electoral democracy, liberal democracy, media freedom, dan civil society participation, bukan hanya dummy rezim.

Hipotesis demokrasi dalam penelitian lanjutan harus memperhatikan kemungkinan nonlinearity dan heterogeneity. Meta-analysis Colagrossi et al. (2020) menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan pertumbuhan berbeda menurut wilayah dan periode. Hal yang sama dapat terjadi pada akuntabilitas.

Sintesis Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai capacity mechanism. Pemerintah yang memiliki sumber daya lebih besar dapat membiayai sistem informasi, audit, pelatihan, digitalisasi, dan partisipasi. Akan tetapi, pertumbuhan tanpa institusi dapat memperbesar sumber daya yang tersedia untuk rente. Aidt et al. (2008) memperlihatkan bahwa hubungan korupsi dan pertumbuhan bersifat regime-specific. Oleh karena itu, pertumbuhan diperkirakan memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas, tetapi kekuatannya bergantung pada kualitas institusi politik dan kontrol korupsi.

Sintesis Kualitas Sumber Daya Manusia

Human development bekerja melalui kapasitas teknis dan kognitif. Pemerintah dengan aparatur yang lebih kompeten dapat mengimplementasikan standar, melakukan rekonsiliasi, menggunakan sistem digital, dan memahami risiko audit. McLeod dan Harun (2014) menunjukkan bahwa kekurangan staf dengan kemampuan akuntansi menjadi hambatan reformasi. Rakhman dan Wijayana (2024) memperkuat bukti empiris bahwa human development berhubungan dengan kualitas pelaporan pemerintah daerah Indonesia.

Namun, hubungan tersebut tidak selalu linear. Kapasitas tinggi dapat meningkatkan kemampuan melakukan estimasi dan accrual management. Karena itu, IPADF memandang human capability perlu berinteraksi dengan ethical governance dan control environment. Penelitian empiris berikutnya sebaiknya menguji apakah internal control atau audit independence memoderasi hubungan human capital dan accountability.

Sintesis Korupsi

Korupsi adalah friksi yang dapat menurunkan efektivitas akuntabilitas. Korupsi dapat mengurangi kualitas informasi, menangkap proses pengadaan, melemahkan audit, dan mengurangi kemungkinan adanya konsekuensi. Chen dan Neshkova (2020) menunjukkan bahwa fiscal transparency dapat berfungsi sebagai instrumen anti-korupsi, sehingga terdapat kemungkinan hubungan timbal balik antara sistem informasi dan korupsi.Brusca et al. (2018) juga menempatkan transparency dan accountability sebagai bagian dari strategi anti-corruption.

Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah
Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Sintesis Sistem Akuntansi

Sistem akuntansi menyediakan struktur data dan aturan yang memungkinkan transaksi pemerintah ditelusuri. Kualitas sistem mencakup adopsi standar, basis akuntansi, ketepatan waktu, kelengkapan pengungkapan, integrasi sistem, internal control, dan kemampuan menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh stakeholder. Studi Indonesia menunjukkan bahwa reformasi akrual memerlukan kapasitas dan koordinasi kelembagaan (McLeod & Harun, 2014). Bukti Vietnam memperlihatkan bahwa accounting capacity dan financial reporting quality berhubungan dengan accountability (Tran et al., 2021). Studi Agostino et al. (2022) memperluasnya ke digitalisasi. Karena itu, IPADF memposisikan accounting system sebagai infrastructure, bukan sekadar variabel teknis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan review memperlihatkan bahwa akuntabilitas publik merupakan outcome ekosistem. Tidak ada satu determinan yang secara konsisten dapat menjelaskan akuntabilitas di semua konteks. Sistem politik dapat menciptakan tekanan, tetapi tekanan dapat berubah menjadi political opportunism. Demokrasi dapat membuka ruang partisipasi, tetapi tanpa informasi yang kredibel masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan efektif. Pertumbuhan dapat menyediakan sumber daya, tetapi sumber daya dapat menjadi rente ketika korupsi tinggi. SDM dapat meningkatkan kemampuan pelaporan, tetapi kemampuan tanpa integritas dapat digunakan untuk judgment oportunistik. Sistem akuntansi dapat menyediakan informasi, tetapi informasi tanpa forum dan konsekuensi hanya menghasilkan transparency without accountability.

Dengan demikian, mekanisme inti IPADF adalah rantai: *Political/Democratic Pressure* menimbulkan *Institutional Response* terhadap *Accounting Information, Public Oversight, Evaluation/Consequence* hingga *Substantive Accountability*. Korupsi dapat memutus rantai tersebut pada setiap tahap. Pertumbuhan ekonomi dan kualitas SDM memperbesar kapasitas untuk memperkuat rantai, sedangkan sistem akuntansi menyediakan bukti yang membuat rantai dapat bekerja.

Perspektif ini juga menjelaskan mengapa hasil penelitian empiris dapat berbeda. Negara dengan demokrasi tinggi tetapi *accounting capacity* rendah dapat memiliki *political accountability* tetapi *financial accountability* yang lemah. Negara dengan sistem akuntansi maju tetapi demokrasi lemah dapat memiliki *formal compliance tetapi* substantive accountability yang rendah. Negara dengan pertumbuhan tinggi tetapi korupsi tinggi dapat memiliki sumber daya besar tetapi *governance outcomes* yang buruk. Heterogenitas tersebut merupakan alasan utama model multidimensional lebih tepat daripada model satu determinan.

Implikasi Teoretis

Penelitian berimplikasi secara teoritis, yaitu pertama, penelitian memperluas teori akuntabilitas dengan menghubungkan actor–forum relationship dengan political, economic, human, and information conditions. Kedua, penelitian mengintegrasikan *agency theory* dan *institutional theory. Agency theory* menjelaskan

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

kebutuhan informasi dan monitoring, sedangkan institutional theory menjelaskan tekanan politik, regulasi, norma, dan legitimasi.

Ketiga, IPADF membedakan pressure, capacity, capability, infrastructure, dan friction sehingga setiap determinan memiliki mekanisme teoritis yang berbeda. Keempat, model memperluas konsep akuntabilitas dari formal compliance menuju substantive accountability.

Implikasi Praktis

Penelitian ini mengandung implikasi praktis, yaitu pertama reformasi akuntansi pemerintah harus berjalan bersama peningkatan kompetensi aparatur, internal control, audit independence, dan akses publik terhadap data. Kedua, demokrasi dan transparansi perlu diarahkan pada mekanisme yang memungkinkan informasi digunakan untuk evaluasi dan konsekuensi, bukan sekadar publikasi dokumen. Ketiga, pemerintah perlu membangun sistem akuntansi digital yang interoperable agar data anggaran, realisasi, aset, pengadaan, dan kinerja dapat ditelusuri. Keempat, program anti-korupsi perlu memanfaatkan fiscal transparency, citizen oversight, audit analytics, dan disclosure pada tahap realisasi anggaran. Dan kelima adalah investasi pada pendidikan dan kompetensi aparatur harus disertai etika, *rotation, segregation of duties,* dan *supervisory controls*.

Keterbatasan Penelitian

Review ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, sumber literatur berasal dari penelusuran terarah melalui penerbit dan indeks akademik, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai sensus seluruh publikasi. Kedua, ukuran akuntabilitas dalam studi terdahulu heterogen. Ketiga, beberapa studi menggunakan transparency atau audit opinion sebagai proxy sehingga belum sepenuhnya menangkap substantive accountability. Keempat, sebagian bukti berasal dari negara atau pemerintah daerah tertentu sehingga generalisasi perlu dilakukan secara hati-hati. Kelima, karena penelitian ini merupakan review naratif terstruktur, tidak dilakukan meta-analysis statistik atas effect size yang berbeda.

KESIMPULAN DAN SARAN

Systematic literature review menunjukkan bahwa akuntabilitas publik merupakan fenomena multidimensional. Sistem politik dan demokrasi menciptakan institutional pressure; pertumbuhan ekonomi menyediakan economic capacity; kualitas sumber daya manusia menyediakan human capability; sistem akuntansi, audit, dan disclosure menyediakan information infrastructure; sedangkan korupsi menjadi accountability friction. Keenam determinan tersebut saling berinteraksi sehingga pengaruh satu variabel tidak dapat sepenuhnya dipahami tanpa memperhatikan variabel lain.

Novelty penelitian terletak pada *Integrated Public Accountability Determinant Framework* (IPADF), yang menjelaskan bahwa *substantive accountability* terjadi ketika *pressure, capacity, capability,* dan *information infrastructure* bertemu dengan pengawasan publik yang efektif dan friksi korupsi dapat ditekan. Kerangka ini

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

menghasilkan tujuh hipotesis yang dapat diuji, terutama H7 mengenai peran moderasi demokrasi pada hubungan sistem akuntansi dan akuntabilitas.

Agenda penelitian berikutnya adalah menguji IPADF menggunakan data panel lintas negara 2010–2025 atau data pemerintah daerah Indonesia. Penelitian empiris dapat membedakan *formal accountability* dan *substantive accountability,* menggunakan indikator yang lebih kaya daripada opini audit, serta menguji *endogeneity* dan *interaction effects.* Dengan demikian, IPADF dapat menjadi jembatan antara *literatur public sector accounting, political economy, governance, development, dan anti-corruption.*

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, A., et al. (2026). Unpacking the emergence of unqualified audit opinions as quasi-accountability in Indonesian public sector. Financial Accountability & Management. https://doi.org/10.1111/faam.70041

Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005). Institutions as the fundamental cause of long-run growth. In P. Aghion & S. Durlauf (Eds.), Handbook of Economic Growth (Vol. 1A, pp. 385–472). Elsevier. https://doi.org/10.1016/S1574-0684(05)01006-3

Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. Journal of Political Economy, 127(1), 47–100. https://doi.org/10.1086/700936

Acharya, A., Lipnowski, E., & Ramos, J. (2024). Political accountability under moral hazard. *American Journal of Political Science*. https://doi.org/10.1111/ajps.12860 (Wiley Online Library)

Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. Asian Journal of Accounting Research, 3(1), 123–138. https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019

Agostino, D., Saliterer, I., & Steccolini, I. (2022). Digitalization, accounting and accountability: A literature review and reflections on future research in public services. Financial Accountability & Management, 38(2), 152–176. https://doi.org/10.1111/faam.12301

Aidt, T. S., Dutta, J., & Sena, V. (2008). Governance regimes, corruption and growth: Theory and evidence. Journal of Comparative Economics, 36(2), 195–220. https://doi.org/10.1016/j.jce.2007.11.004

Ahyaruddin dan Akbar secara eksplisit menggunakan perspektif *institutional isomorphism* untuk menganalisis akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah di Indonesia. https://doi.org/10.18196/jai.190187 (Jurnal UMY)

Alt, J. E., Lassen, D. D., & Rose, S. (2006). The causes of fiscal transparency: Evidence from the U.S. states. IMF Staff Papers, 53(Special Issue).

Badewin, Elizabeth, R., Rusmardiana, A., Rely, G., & Judijanto, L. (2025). Accountability and transparency in local government financial reporting: An empirical study in Indonesia. Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 13(4), 831–842. https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i4.3642

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Benhabib, J., & Przeworski, A. (2010). Economic growth under political accountability. International Journal of Economic Theory, 6(1), 77–95. https://doi.org/10.1111/j.1742-7363.2009.00123.x

Bawono, A. D. B., Arifin, K. M. D., Purbasari, H., & Saputra, A. E. (2020). The local government performance as mediating variable on the influence of internal control system on the financial statement accountability: Evidence in Indonesia. Proceedings of ICBAE 2020. https://doi.org/10.4108/eai.5-8-2020.2301185

Bonollo, E. (2019). Measuring supreme audit institutions' outcomes: Current literature and future insights. Public Money & Management, 39(7), 468–477. https://doi.org/10.1080/09540962.2019.1583887

Bonollo, E. (2023). Negative effects of the adoption of accrual accounting in the public sector: A systematic literature review and future prospects. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 35(6), 1–27. https://doi.org/10.1108/JPBAFM-06-2022-0097

Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x

Brusca, I., Manes Rossi, F., & Aversano, N. (2018). Accountability and transparency to fight against corruption: An international comparative analysis. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice, 20(5), 486–504. https://doi.org/10.1080/13876988.2017.1393951

Chan, J. L. (2003). Government accounting: An assessment of theory, purposes and standards. Public Money & Management, 23(1), 13–20. https://doi.org/10.1111/1467-9302.00336

Chen, C., & Neshkova, M. I. (2020). The effect of fiscal transparency on corruption: A panel cross-country analysis. Public Administration, 98(1), 226–243. https://doi.org/10.1111/padm.12620

Christensen, M., & Yamamoto, K. (2023). Public accountability and democracy: An accountability stage in the theatre of democracy. Financial Accountability & Management, 39(2), 259–267. https://doi.org/10.1111/faam.12360

Colagrossi, M., Rossignoli, D., & Maggioni, M. A. (2020). Does democracy cause growth? A meta-analysis of 2000 regressions. European Journal of Political Economy, 61, 101824. https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.101824

DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review, 48*(2), 147–160. https://doi.org/10.2307/2095101 (JSTOR)

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review, 14*(1), 57–74. https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003 (AOM Journals)

Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. *The Journal of Law and Economics, 26*(2), 301–325. https://doi.org/10.1086/467037 (RCNi Company Limited)

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Ferza, R., & Lee, D. S. (2026). Online accessibility of local public enterprise financial statements in Indonesia: Can it be predicted by institutional traits of parent local governments? Public Administration and Development, 46(1), 7–20. https://doi.org/10.1002/pad.70025

Goddard, A., Assad, M., Issa, S., Malagila, J., & Mkasiwa, T. A. (2016). The two publics and institutional theory: A study of public sector accounting in Tanzania. *Critical Perspectives on Accounting, 40*, 8–25. https://doi.org/10.1016/j.cpa.2015.02.002 (ScienceDirect)

Inata, L. C., Saraswati, E., & Ghofar, A. (2022). Financial statements disclosure on Indonesian local government: IPSAS and PSAP disclosure approach. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 12(3). https://doi.org/10.22219/jrak.v12i3.20938

Jatmiko, B., Haya, B. S., & Utami, T. P. (2022). Enhancing value for money performance in local government organizations: The role of public financial accountability and internal control. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, 12(2). https://doi.org/10.22219/jrak.v12i2.22143

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360. https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X (ScienceDirect)

Kim, S., & Lee, J. (2019). Citizen participation, process, and transparency in local government: An exploratory study. Policy Studies Journal, 47(4), 1026–1047. https://doi.org/10.1111/psj.12236

Kisworo, J., & Shauki, E. R. (2019). Teori institusional dalam penyusunan dan publikasi laporan tahunan sektor publik: Studi kasus pada kementerian dan lembaga negara di Indonesia. *Indonesian Treasury Review, 4*(4), 305–321. https://doi.org/10.33105/itrev.v4i4.157 (Itrev Kemenkeu)

McLeod, R. H., & Harun, H. (2014). Public sector accounting reform at local government level in Indonesia. Financial Accountability & Management, 30(2), 238–258. https://doi.org/10.1111/faam.12035

Marota, R., & Johari, R. J. (2025). Enhancing governance through IPSAS: Impacts on transparency and accountability in public sector financial reporting. *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi), 9*(2). https://doi.org/10.23887/jia.v9i2.86364 (Ejournal Undiksha)

Mauro, P. (1995). Corruption and growth. The Quarterly Journal of Economics, 110(3), 681–712. https://doi.org/10.2307/2946696

Mediaty, Pontoh, G. T., Nagu, N., HS, R., Mas'ud, A. A., & Aziz, R. H. A. (2025). Human competencies: Amplifying financial reporting quality in Indonesian local government. *Journal of Risk and Financial Management, 18*(8), 424. https://doi.org/10.3390/jrfm18080424

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony. *American Journal of Sociology, 83*(2), 340–363. https://doi.org/10.1086/226550 (RCNi Company Limited)

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Modell, S. (2001). Performance measurement and institutional processes: A study of managerial responses to public sector reform. *Management Accounting Research, 12*(1), 95–123. https://doi.org/10.1006/mare.2000.0136 (ScienceDirect)

Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? *Public Administration, 78*(3), 555–573. https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218

Muhtar, M., Payamta, P., Sutaryo, S., & Amidjaya, P. G. (2020). Government accrual-based accounting standards implementation in Indonesia: The role of local government internal audit. Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D, 28(3). https://doi.org/10.46585/sp28031107

Nasution, Y. N., & Supriadi, Y. (2024). The role of human resources competence in improving quality of the financial reports of the Indonesian state-owned enterprises. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12*(6), 567–578. https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i6.3217

Nuryani, N., & Firmansyah, A. (2020). Determinants of transparency in financial management on local government websites: Evidence from Indonesia. Humanities and Social Sciences Letters, 8(2), 145–155. https://doi.org/10.18488/journal.73.2020.82.145.155

O'Donnell, G. (1998). Horizontal accountability in new democracies. *Journal of Democracy, 9*(3), 112–126. https://doi.org/10.1353/jod.1998.0051

Pakpahan, R., Murwaningsari, E., & Mayangsari, S. (2022). Influence of internal control system weaknesses and audit quality on the quality of local government financial reports in Indonesia with good government governance as moderating. International Journal of Science, Technology & Management, 3(2). https://doi.org/10.46729/ijstm.v3i2.463

Parker, L. D., & Favotto, A. (2026). Penetrating the political in public sector accounting and audit: Addressing public, managerial, and political accountability. Financial Accountability & Management, 42(1), 49–61. https://doi.org/10.1111/faam.70008

Pratama, A., Afiah, N. N., & Alfian, A. (2023). Does the quality of local government reporting disclosure get better with size and age? Study in West Java local government, Indonesia. Review of Economics and Finance, 21, 2798–2807. https://doi.org/10.55365/1923.x2023.21.303

Prawati, L. D., & Murwaningsari, E. (2025). Determinant factors of financial reporting quality in local government: The evidence from public sector in Indonesia. Journal of Applied Finance and Accounting, 11(2). https://doi.org/10.21512/jafa.v11i2.12469

Rakhman, F., & Saudagaran, S. (2023). The effect of political budget cycle on local governments' financial statements in a young democracy. *Public Money & Management, 43*(5), 512–520. https://doi.org/10.1080/09540962.2023.2173369 (Taylor & Francis Online)

Rakhman, F., & Wijayana, S. (2024). Human development and the quality of financial reporting among the local governments in Indonesia. Journal of International

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Accounting, Auditing and Taxation, 56, 100634. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2024.100634

Rasmini, N. K., & Masdiantini, P. R. (2018). Fiscal decentralization, internal control system, accountability of local government and audit opinion. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, 13(2). https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p06

Romzek, B. S., & Ingraham, P. W. (2000). Cross pressures of accountability: Initiative, command, and failure in the Federal Bureaucracy. *Journal of Public Administration Research and Theory, 10*(3), 525–556. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jpart.a024280

Ritonga, I. T., & Syahrir, S. (2016). Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: Berbasis website. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, 20(2). https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss2.art4

Sari, R., & Muslim, M. (2023). Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review. *Amkop Management Accounting Review, 3*(2), 90–106. https://doi.org/10.37531/amar.v3i2.1440 (Vivat Academia)

Setyawan, W., & Gamayuni, R. R. (2020). The quality of financial reporting and internal control system before and after the implementation of e-budgeting in Indonesia local government. Asian Journal of Economics, Business and Accounting, 14(3), 22–31. https://doi.org/10.9734/ajeba/2020/v14i330194

Shonhadji, N. (2018). Accrual accounting & financial reporting in the public sector to enhance accountability and transparency: Reframing implementation in Indonesia. EKUITAS, 14(1). https://doi.org/10.24034/j25485024.y2010.v14.i1.198

Sjahrir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters, 120*(2), 342–345. https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007

Suprihastini, E., Akram, A., & Santoso, B. (2018). Effect of regional financial accounting system, internal control systems and regional financial audit on financial accountability of local government. Proceedings of International Conference on Economics, Business and Information Technology. https://doi.org/10.31967/prmandala.v1i0.163

Suryanto, S., & Kurniati, P. S. (2025). The influence of public sector accounting systems and budget transparency on quality financial reports in local governments. *@is The Best: Accounting Information Systems and Information Technology Business Enterprise, 10*(1). https://doi.org/10.34010/aisthebest.v10i1.15979 (OJU Komputer Indonesia)

Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). Effects of leadership and accounting capacity on accountability through the quality of financial reporting by public organisations in Vietnam. Journal of Asia Business Studies, 15(3), 484–502. https://doi.org/10.1108/JABS-02-2020-0077

Vol 8 No 11 (2026) 5098 – 5111 P-ISSN 2656-2871 E-ISSN 2656-4351
DOI: 10.47467/alkharaj.v8i11.13491

Tran, Y. T., Nguyen, N. P., & Hoang, T. C. (2021). The role of accountability in determining the relationship between financial reporting quality and the performance of public organizations: Evidence from Vietnam. Journal of Accounting and Public Policy, 40(1), 106801. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106801

Yuniar, M. R., & Firmansyah, A. (2023). The transparency level of local governments in Indonesia: Does the level of financial health matter? Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 9(1). https://doi.org/10.28986/jtaken.v9i1.1195